

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Pemerintah Indonesia mengharapkan perubahan pada bidang akuntansi pemerintah, karena dengan melalui proses tersebut diharapkan akan memberikan informasi keuangan yang relevan dan reliable. Kemudian pemerintah Indonesia merubah kebijakan akuntansi pemerintahan yang sebelumnya berbasis kas menjadi basis akrual. Namun demikian, pada laporan keuangan, laporan realisasi anggaran tetap diakui berdasarkan basis kas. Hal ini yang menyebabkan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan belum bisa dikatakan sempurna.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksempurnaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan adalah anggaran yang digunakan masih menggunakan basis kas, sehingga untuk menyajiakan laporan realisasi anggaran harus menggunakan basis kas. Selain itu bisa dikatakan bahwa sumber daya manusianya masih belum siap atas perubahan yang diterapkan, sehingga belum bisa menerapkan anggaran berbasis kas.

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan tugasnya dengan menyusun laporan realisasi anggaran dengan baik dan benar. Metode yang digunakan dalam menyusun laporan realisasi anggaran adalah basis kas. Dalam penyusunannya Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sudah menyusun laporan realisasi anggaran dengan benar.

Untuk menyusun laporan realisasi anggaran berbasis kas, dibutuhkan laporan operasional untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual. Dalam hal ini, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur telah menyusun laporan operasional dengan benar dan baik. Dalam menyusun laporan operasional,

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur juga telah sesuai berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

3.2 Saran

3.2.1 Saran untuk Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Secara umum Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur telah menyusun laporan keuangannya dengan baik, namun lebih baik lagi apabila Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dapat menyusun laporan realisasinya berdasarkan basis akrual, dengan demikian Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur juga harus bisa menyusun anggarannya berdasarkan basis akrual.

Dengan adanya masa peralihan seperti saat ini, lebih baik Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melakukan pelatihan untuk sumber daya manusianya, supaya dapat mengikuti perubahan-perubahan yang di terapkan pemerintahan. Dengan demikian Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bisa menjadi pelopor sebagai instansi negara yang melaksanakan penyusunan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan basis akrual.

3.2.1 Saran untuk Pemerintahan Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki tujuan yang sangat baik dalam melakukan perubahan terhadap bidang akuntansi pemerintahan, diantaranya adalah mengubah basis kas menuju basis akrual. Seperti yang dijelaskan didalam kerangka konseptual PP Nomor 71 tahun 2010, bahwa perubahan ini bertujuan untuk menciptakan keuangan pemerintahan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Namun pada hal ini penulis merasa nilai efisiensi dan dapat dipahami pada laporan keuangan pemerintah itu kurang, karena dengan perubahan dari basis kas menuju basis akrual, penyusunan laporan realisasi anggaran tetap dilaksanakan dalam basis kas. Sehingga pelapor harus menyusun laporan operasional yang dimana pada dasarnya sama dengan laporan realisasi, hanya saja laporan operasional menggunakan basis akrual dalam penyusunannya. Penulis menyarankan, apabila pemerintah Indonesia menginginkan perubahan basis akrual secara penuh, maka lebih baik Pemerintah Indonesia juga mencanangkan